

**PERSYARATAN DAN MEKANISME PENUNJUKAN UTUSAN
KHUSUS DAN STAF KHUSUS PRESIDEN DALAM PERPRES NOMOR
137 TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH**

SKRIPSI

Oleh

Siti El Islamyah Sholikhah Cahya Auri Syamsuddin

NIM. 05020421055



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti El Islamyah Sholikhah Cahya Auri Syamsuddin
NIM : 05020421055
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyāsah)
Judul : Persyaratan dan Mekanisme Penunjukan Utusan Khusus dan
Staf Khusus Presiden dalam Perpres Nomor 137 Tahun 2024
Perspektif Fiqh Siyāsah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Siti El Islamyah S.C.A.S

NIM. 05020421055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti El Islamyah Sholikhah Cahya Auri Syamsuddin

NIM : 05020421055

Judul : Persyaratan dan Mekanisme Penunjukan Utusan Khusus dan Staf Khusus Presiden dalam Perpres Nomor 137 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyāsah

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 18 Agustus 2025

Pembimbing,



Achmad Saffudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti El Islamyah Sholikhah Cahya Auri Syamsuddin

NIM. : 05020421055

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari **Rabu**, 29 Oktober 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Achmad Safiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji III

Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji II

Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.
NIP. 19920402022020122018

Surabaya, 14 November 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Subhan Musata'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti El Islamyah Sholikhah Cahya Auri Syamsuddin.
NIM : 05020421055
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : Sitielismyaaah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Utusan Khusus dan Staf Khusus Presiden Dalam Perpres Nomor 137

Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Desember 2025

Penulis

(Siti El Islamyah S.C.A.S)

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial, memberikan wewenang yang signifikan kepada Presiden untuk menunjuk pejabat, termasuk Staf Khusus dan Utusan Khusus, untuk membantu tugas-tugas pemerintah yang berada di luar struktur menteri reguler. Sementara peraturan terbaru, Peraturan Presiden (Perpres) No. 137 Tahun 2024, merinci tugas, posisi, dan hak keuangan mereka, namun tidak memiliki ketentuan eksplisit mengenai kualifikasi dan kompetensi khusus yang diperlukan untuk peran tersebut. Tidak adanya persyaratan yang jelas dan mekanisme seleksi yang transparan ini menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas, potensi konflik kepentingan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip sistem prestasi dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua masalah: (1) Bagaimana Analisis Hukum Positif Terhadap persyaratan dan mekanisme pengangkatan Utusan Khusus dan Staf Khusus dalam Perpres Nomor 137 Tahun 2024? (2) Bagaimana analisis Fiqh Siyāsah terhadap persyaratan dan mekanisme penunjukan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang untuk menganalisis hak prerogatif presiden dan peraturan penunjukan untuk utusan khusus dan staf khusus, dilengkapi dengan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip dan teori hukum yang mendasarinya, termasuk Fiqh Siyāsah, Teori Jabatan, dan Prinsip Umum Tata Kelola yang Baik. Dengan kerangka pemikiran serta objek pembahasan tersebut, maka digunakan metode analisis deskriptif analisis untuk menggambarkan persyaratannya dan mekanisme pengangkatan staf khusus dan utusan khusus. Setelah menjelaskan bahan hukum yang bersifat kualitatif baik merupakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang didapatkan dengan teknik *library research* maka penulis mendapatkan kesimpulan atas hasil penelitian.

Dalam penelitian ini menghasilkan analisis. Pertama, Persyaratan pengangkatan staf khusus dan utusan khusus dalam perpres 137 tahun 2024 tidak selaras dengan jabatan yang setingkat seperti JPT Madya dan Menteri, Teori Jabatan, dan AAUPB. penunjukan ini sebagian besar merupakan keputusan diskresioner dan pribadi Presiden. Kedua, berdasarkan perspektif Fiqh Siyāsah, Praktik penunjukan yang tertutup dan tidak partisipatif, serta tanpa penilaian kompetensi yang objektif, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang

Sejalan dengan hasil penelitian, disarankan agar pengaturan mengenai pengangkatan staf khusus dan utusan khusus Presiden diperkuat dengan undang-undang khusus. Dalam kriteria/substansi pengangkatan, sebaiknya ditambahkan syarat minimum seperti pendidikan tinggi, pengalaman, dan keahlian di bidang tertentu, serta mekanisme seleksi yang terbuka dan transparan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar hukum islam seperti al-kafa'ah (kompetensi), amanah (kepercayaan), dan adl (keadilan) harus diintegrasikan ke dalam kerangka peraturan untuk memastikan penunjukan memprioritaskan kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan wewenang

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Landasan Teori.....	15
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	19
J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II.....	26
KONSEP PENGISIAN JABATAN DALAM FIQH SIYĀSAH.....	26
A. Konsep Fiqh Siyāsah	26
B. Teori Jabatan.....	52
D. Prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)	61
E. Konsep Staf Khusus dan Utusan Khusus Presiden.....	66
F. Konsep Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya.....	87
G. Konsep Menteri Negara	94
BAB III	102

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERSYARATAN DAN MEKANISME PENUNJUKAN UTUSAN KHUSUS DAN STAF KHUSUS PRESIDEN.....	102
A. Analisis Hukum Terhadap Persyaratan Pengangkatan Utusan Khusus dan Staf Khusus Presiden.....	102
B. Analisis Hukum Terhadap Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Utusan Khusus dan Staf Khusus Presiden.....	138
BAB IV	144
ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN UTUSAN KHUSUS DAN STAF KHUSUS PRESIDEN.....	144
A. Aspek Al-Kafa’ah dalam Pengangkatan Utusan Khusus dan Staf Khusus Presiden	144
B. Aspek Al-‘Adalah dalam Pengangkatan Utusan Khusus dan Staf Khusus Presiden	170
C. Aspek Al-Amanah dalam pengangkatan Utusan Khusus dan Staf Khusus Presiden	178
BAB V.....	179
PENUTUP	179
A. Kesimpulan.....	179
B. SARAN	180
DAFTAR PUSTAKA.....	181
LAMPIRAN	190

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andiko. *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Daud, Muhammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, N.D.
- H.A Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Persada, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Philipus, M Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Poerdarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Rahman, Diva Febrina Nurcahyani. "Peran Dan Kedudukan Staf Khusus Presiden Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Sedamayanti. *Max Weber Dalam Bukunya Sedamayanti, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Dan Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Refka Aditama, 2010.
- Soemantri, Sri. *Masalah Ketatanegaraan Dewasa Ini*. Bandung: Alumni Bandung, 1984.

Toha, Miftah. *Birokrasi Politik Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Utama, Farhan Abdi. "Mentokrasi Di Berbagai Negara Di Dunia (Perbandingan Konstitusi)." *Badan Kepegawaian Negara* 10, No. 2 (2016): 18.

b. Jurnal

Agustin, Widjiastuti. "Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dar Kkn" 22, No. 2 (2017): 96–110.

Ahmad, Badu, And Muhammad Badik. "Government's Official's Professionalism In Public Service (Case Study In Licensing Service Innovation In Pinrang District, South Sulawesi)." *Braz. J. Pub. Pol'y* 12 (2022): 375.

Ahmad, Sabri. "Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Lembaga Pendidikan Islam." *Al-Ta Lim Journal* 20, No. 2 (2013): 373–79.

Bagas Rio, Muhammad, Rahma Kemala Dewi, And Sely Agustina. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawla: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 6, No. 1 (2022): 71–83.

Barantsova, Irina Dkk. "Competence As A Concept In Professional Training Of Future Specialists." *Sprin Journal Of Arts, Humanities And Social Sciences* 1, No. 06 (2022): 294–99.

Brykjeftot. "The Impact And Interpretation Of Weber's Bureaucratic Ideal Type In Organisation Theory And Public Administration,," 2018. <https://doi.org/10.1108/S0195-631020180000033006>.

Buhori, Muhammad Rizal, And Muhammad Eko Atmojo. "Pelaksanaan Lelang Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Berbasis Sistem Merit Di Kabupaten Klaten Tahun 2018." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7, No. 3 (2022).

Cahyadi, Arif. Bagoes Soenarjanto. "Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya." *Jpap: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, No. 1 (2018).

Djasuli, Fisari. Dinda Harum. Rikha Amelia. Moh. "Implementasi Prinsip Kesetaraan Pada Masa Kepemimpinan Umar Bin Khattab." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 2, No. 3 (2022).

Faishol, Achmad Sulton. Yoyo Hambali. Oni Wastoni. "Qiyas Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 13, No. 1 (2022): 33–64.

Faiz, Ahmad. Endang Larasati. Teuku Afrizal. "Revitalisasi Merit System Dalam Pengangkatan Jabatan Fungsional Di Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah."

- Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)* 4, No. 1 (2021): 306–13.
- Febrina, Rury. “Implementasi Sistem Merit Dalam Rekrutmen ASN Di Kabupaten Kampar.” *Journal Of Governance Innovation* 3, No. 1 (2021): 73–88.
- Fisari, Dinda Harum, Amelia Rikha, And Mohammad Djasuli. “Implementasi Prinsip Kesetaraan Pada Masa Kepemimpinan Umar Bin Khattab.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis* 2, No. 3 (2022).
- Fitriyani, Abdul Basir, And Abdul Rouf Fansyuri. “Konsep-Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah.” *FARABI* 19, No. 1 (2022): 1–15.
- Hanif, David. “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah.” *Lex Renaissance* 7, No. 1 (2022): 153–66.
- Hari, Suharsa, Dadang Jam’an Soleh, And Asep Miftahuddin. “Merit Systems: Analisis Bibliometrik Pada Kinerja Dan Reformasi Tenaga Kependidikan.” *Jurnal Inspirasi* 13, No. 1 (2022): 92–98.
- Hizbullah, Muhammad, And Haidir Haidir. “Hukum Islam Dalam Pandangan Pemikir Muslim Kontemporer Dan Orientalis.” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, No. 1 (2022): 1–10.
- Huda, Miftahul. “Syariah, Fiqih Dan Sebuah Perspektif Tentang Tarjih.” *Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 2 (2011): 220–33.
- Indriastuti, Indriastuti. “Memahami Kembali Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).” *Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik* 10, No. 1 (2020): 60–75.
- Ismail, Aprilian Nurahsan, And Taufiqurrohman Syahuri. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pejabat Pemerintah Untuk Melakukan Diskresi (Freis Emessen).” *Depositi : Jurnall Publikasi Ilmu Hukum* 2, No. 3 (2024): 165–78.
- Ismail, Nurwita. “Merit System Dalam Mewujudkan Transparansi Pembinaan Karier Aparatur Sipil Negara.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, No. 1 (2019): 33–4.
- Khobiburrohma, Eviva Nur Dkk. “Penerapan Sistem Merit Dalam Birokrasi Indonesia Untuk Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 3, No. 2 (2020): 139–48.
- Kuswara, Denny. Ima Mayasari. “Implementasi Manajemen PNS Berbasis Merit Dalam Penempatan Jabatan Struktural Pegawai Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.” *Cakrawala Repositori IMWI* 6, No. 1 (2023): 2023.
- Krisdianto, F. Dan D. J. “Urgensi Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam

- Pengangkatan Jabatan Publik.” *As-Syar’i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 2024.
- Mahdi, Sufian. “An Explanation Of The Most Important Components Of Management Competence In Project Based Organizations.” *The Internasional Journal Of Management*, 2015.
- Masyrofah. “Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Wizarah Dan Kedudukan Wazir.” *ADALAH* 6, No. 3 (2022): 44–53.
- Mauliddin, I, Herijanto Bakti, And Ramadhan Pancasilawan. “Preflood Management Collaboration In Bandung District.” *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 5, No. 2 (2022): 116–239.
- Molina Rodriguez-Navas. Dkk. “Transparency For Participation Through The Communication Approach.” *ISPRS International Journal Of Geo Information* 10, No. 9 (2021): 586.
- Mukhlisin. “Keadilan Dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif ‘Al-Adl’ Dalam Al-Qur’an.” *Media Keadilan: Jurnal Hukum* 11, No. 1 (2020): 55–75.
- Muthalib, Salman Abdul, And Muhammad Faizur Ridha. “Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur’an.” *Tasfe: Journal Of Qur’anic Studies* 4, No. 2 (2019): 150–66.
- Nugraha, K. P. “Meneropong Perdebatan Uu Wantimpres: Menimbang Efektivitas Dan Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia: Examining The Debate On The Presidential Advisory Council Law: Weighing The Effectiveness And Optimization Of The Constitutional System In Indo.” *Japhtn-Han*. (2024).
- Nuris, Moh Anwar. “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Memajukan Kabupaten Jember.” *Rechtenstudent* 1, No. 3 (2020): 302–10.
- Oktarinda, Adhitya. Dkk. “Polemik Terhadap Masyarakat Tentang Keberadaan Staf Khusus Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.” *Manajemen, Hukum Dan Sosial* 2, No. 2 (2024): 74–80.
- Prabandani, Hendra Wahyu. “Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden (Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power).” *Jurnal Legislasi* 12, No. 03 (2015): 270–71.
- Putri . W. N. Bela Dan Erkina Chandra. “Kebijakan Kedudukan Staf Khusus Dalam Kegiatan Administrasi Pemerintahan Di Indonesia.” *Jurnal Of Judicial Review* 22, No. 2 (2020): 188.
- Putri, Kania Dewi Andhika. Ridwan, Arifin. “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review Of Justice And

- Legal Certainty In Indonesia).” *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, No. 2 (2018): 142–58.
- Rahmani And Ansorullah. “Tinjauan Yuridis Tentang Kekosongan Kekuasaan Pemerintah Dalam Perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Limbago: Journal Of Constitutional Law*. 2022.
- Raen Puluhulawa, M. “Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Di Sistem Pemerintahan Ri.” *Deposisi : Jurnall Publikasi Ilmu Hukum*. 2023.
- Ramadani, I. Dkk. “Analisis Yuridis Normatif Terhadap Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 Tentang Penasehat Khusus, Utusan Khusus, Staf Khusus Presiden Dan Staf Khusus Wakil Presiden.” *As-Sais: Hukum Tata Negara / Siyasa*.
- Riwukore, Jefirston Richset, Fellyanus Habaora, And Terttiaavini Terttiaavini. “Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7, No. 1 (2022).
- Robitul, Firdaus. “Kedudukan Kepala Negara Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Analisis Kritis Terhadap Peran Khalifah Dalam Dustur Al-Islamy Hizbut Tahrir).” *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (IJLIL)* 1, No. 1 (N.D.): 1– 31.
- Rosalina, Irma, Yani Nurhadryani, And Irman Hermadi. “Analisis Penerapan Good University Governance Pada Pelayanan Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan Menggunakan TOGAF ADM.” *Jurnal Pendidikan Informatika Dan Sains* 11, No. 1 (2022): 52–56.
- Saputri, R., D. A. Putra And F. P. R. A. De Sousa. “Prinsip Non-Diskriminatif Dalam Persyaratan Kampanye Pemilihan Umum Bagi Pejabat Negara.” *Jurnal Usm Law Review*. 2024.
- Sabani, A. E. Al. “Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia.” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*. 2024.
- Siboy, A. “Desain Jalan Tengah Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Penyusunan Kabinet.” *Proceeding Aphtn-Han*. 2023.
- Subandi, Subandi. “Promosi Jabatan, Mutasi, Dan Motivasi Berprestasi Sebagai Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.” *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen* 8, No. 1 (2020): 118–28.
- Sucipto, Imam, And Oyo Sunaryo Mukhlas. “Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Menurut Fiqh Qadha Dan Undang-Undang Di Indonesia.” *ISLAMICA* 6, No. 1 (2022): 12–22.
- Suharsa, Hari. “Merit Systems: Analisis Bibliometrik Pada Kinerja Dan Reformasi

- Tenaga Kependidikan.” *Jurnal Inspirasi* 13, No. 1 (2022): 92–98.
- Sumadi, Ahmad Fadil. “Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.” *Jurnal Konstitusi* 12, No. 4 (2016): 849–71.
- Sunny Ummul, Firdausy Abdurrahman, Rizal. “Firdausy, S. U., & Abdurrahman, R. (2017). Analisis Batasan Kewenangan Presiden Dalam Membentuk Peraturan Presiden Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UNDANGAN.” *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 1, No. 3 (2017): 85–98.
- Suparman, Odang. “Optimalisasi Dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance.” *AHKAM* 2, No. 1 (2023): 76–89.
- Syakhriani, Abdul Wahab. Hidayah. “Kedudukan Hadist Dalam Pembentukan Hukum.” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Hadis* 3, No. 1 (2023): 24–31.
- Syifaun, Nada. “Fikih Indonesia Dalam Perspektif Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy Dan Hazairin.” *El-Aqwal: Journal Of Sharia And Comparative Law*, 2022, 79–88. <https://doi.org/10.24090/El-Aqwal.V1i2.6935>.
- Tioaqzha, R. “Kajian Yuridis Pngisian Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Bondowoso Berdasarkan Permenpan Rb Ri No. 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah.” *Indonesian Journal Of Law And Justice*. 2023.
- Umar, Mohamad Toha. “Ijma’Sukuti Dalam Pelebaran Mas’a Dan Mina Jadid Perspektif Sumber-Sumber Utama Hukum Dalam Ushul Fiqh.” *El-Aqwal: Journal Of Sharia And Comparative Law*, 2022, 53–60.
- Utama, Cholidah Dkk. “Positioning The Civil Servant As Public Service Implementer Based On The Level Of Professionalism Measurement.” *Jurnal Dinamika Hukum* 22, No. 3 (2022)
- Utama, Farhan Abdi. “Mentokrasi Di Berbagai Negara Di Dunia (Perbandingan Konstitusi).” *Badan Kepegawaian Negara* 10, No. 2 (2016): 18.
- Wijaya, Andy Fefta. “Perspective Merit System On Placement Regulation Of High Level Official Civil Servants (A Case Study Of Placement Civil Servants In Local Government On Palembang).” *HOLISTICA Journal Of Business And Public Administration* 10, No. 2 (2019): 187–206.
- Wijaya, Arif. “Hukum Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif.” *Al-Qānūn* 12, No. 2 (2009).
- Winanti, Sherly Atha. “Analisis Patronase Politik Terhadap Birokratisasi Pemerintahan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*

22, No. 2 (2020): 222–33.

Yulius. “Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, No. 3 (2015): 361–84.

Yunus, Mohammad Ismail Bin Mohamad. “Good Governance According To Islamic Perspective.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 3 (2017): 200–230.

c. Blog

Al-Qur'an, Al-Baqarah: 247

Al-Qur'an, Al-Syura: 38

Al-Qur'an, Sad: 26

Al-Qur'an: An-Nisa: 58

Anjelina, Nora. “Konsep Persyaratan Pengangkatan Menteri Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Dan Relevansinya Dengan Perspektif Imam Al-Mawardi.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

As'ari, Hasannudin. “Merit System Sebagai Mekanisme Pengisian Posisi Menteri Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Perspektif Masalah Mursalah.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Azizah, Nurul, And Yulaika Ramadahni. “Kumpulan Ayat Al-Qur'an Dan Hadist Tentang Kepemimpinan Yang Baik.” Tirta.Id, 2019. <https://Tirta.Id/Kumpulan-Ayat-Al-Quran-Dan-Hadis-Tentang-Kepemimpinan-Yang-Baik-Hbrq>

Dewi, Santi. “Alasan Belva Pilih Mundur Posisi Staf Khusus Jokowi.” Idntimes.Com, 2020. <https://Www.Idntimes.Com/News/Indonesia/Alasan-Belva-Pilih-Mundur-Posisi-Staf-Khusus-Jokowi-00-Bbwlv-3d2r44https://Www.Idntimes.Com/News/Indonesia/Alasan-Belva-Pilih-Mundur-Posisi-Staf-Khusus-Jokowi-00-Bbwlv-3d2r44>.

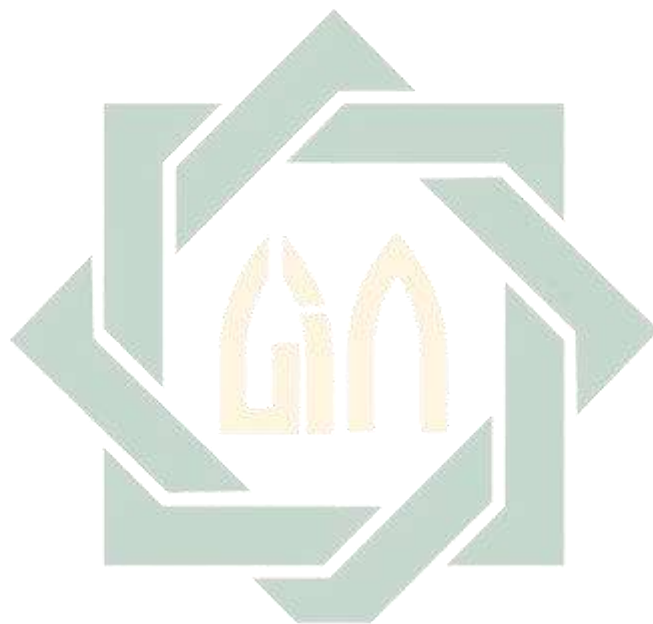
Elnizar, Norman Edwin. “5 Fakta Hukum Seputar ‘Staf Khusus Presiden.’” Hukumonline.Com, 2020. <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/5-Fakta-Hukum-Seputar-Staf-Khusus-Presiden-Lt5ea2b68da9b7a/?Page=2>.

Hasanah, Nur. “Analisis Hukum Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Terhadap Pengangkatan Menteri Kabinet”.” Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019

- Peraturan Presiden No 40 Tahun 2005 Tentang Staf Khusus Presiden
- Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 Tentang Penasehat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden Dan Staf Khusus Wakil Presiden
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Dan Staf Khusus Wakil Presiden
- Prasetyo, Wisnu. “Kemendikbud Tak Akui Gelar Honoris Causa Raffi Ahmad Kampus Tak Berizin.” Kumparan.Com, 2024.
<https://Kumparan.Com/Kumparannews/Kemendikbud-Tak-Akui-Gelar-Honoris-Causa-Raffi-Ahmad-Kampus-Tak-Berizin-23f7weorpbb>.
- Pratiwi, Gita. “Skandal Surat Icw Minta Jokowi Copot Stafsus Andi Taufan.” Pikiranrakyat.Com, 2020. <https://Www.Pikiran-Rakyat.Com/Nasional/Pr-01366027/Skandal-Surat-Camat-Icw-Minta-Jokowi-Copot-Stafsus-Andi-Taufan>.
- Putra, Agung Mahasyah. “Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Staf Khusus Kepresidenan Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.
- Putri, Adisty Farida. “Syarat-Syarat Kepala Negara Menurut Pasal 169 Huruf D Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Rahman, Diva Febrina Nurcahyani. “Peran Dan Kedudukan Staf Khusus Presiden Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Septiani, Argi. “Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Tanfiziyah.” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021.
- Setuningsih, Novianti. “Tugas Raffi Ahmad Sebagai Utusan Khusus Presiden.” Kompas.Com, 2024.
<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/10/22/14552131/Tugas-Raffi-Ahmad-Sebagai-Utusan-Khusus-Presiden>.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara
- Wahab, Aziz. “Kedudukan Wazir (Kementrian) Menurut Imam Al-Mawardi.”

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A